

Politik Multikulturalisme Novel-Novel Indonesia

Oleh:

Aprinus Salam

PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karya sastra selayaknya diposisikan menjadi bagian yang terintegrasi bagi proses-proses bernegara, berbangsa, dan berbudaya. Pemosisian itu dengan menempatkan karya sastra sebagai refleksi “anak bangsa” dalam merefleksikan gagasan-gagasan tentang kehidupan. Dalam posisi itu, karya sastra merupakan dokumen sosial yang layak dikaji dan disosialisasikan sebagai bagian dari proses tersebut. Itulah sebabnya, kajian kesusastraan yang bersifat klarifikasi kewacanaan berkaitan dengan gagasan-gagasan “anak bangsa” dalam ikut berpartisipasi membangun negara, kebangsaan, dan kebudayaan menjadi penting dan selalu relevan.

Setelah mengalami masa-masa yang cukup panjang dalam proses pembangunan, hingga hari ini masyarakat Indonesia masih mencari “bangunan kebudayaan yang paling cocok untuk dirinya” mengingat bangsa Indonesia yang sangat majemuk, baik dari segi etnis, agama, ras, maupun berbagai kepentingan lainnya. Implikasi ketidakcocokan bangunan kebudayaan itu masih terlihat dengan banyaknya konflik, kekerasan, dan berbagai perkelahian sosial yang menimbulkan banyak korban dan kerugian.

Namun demikian, dalam satu dekade belakangan ini Indonesia memasuki sebuah era baru, yang biasa disebut sebagai era reformasi. Seperti telah menjadi suatu kelaziman, berganti era kekuasaan, berganti era politik, sosial, dan budaya, maka berganti pula problem-problem yang dihadapi masyarakat dan negara Indonesia. Problem utama yang dihadapi Indonesia adalah memperbaiki negara yang rusak dan negatif di mata warga akibat warisan Orde Baru. Reformasi harus dapat membangun Indonesia yang baru dan lebih baik.

Ketika berbicara mengenai sebuah bangunan, maka pertanyaan penting yang kemudian muncul adalah elemen apa dalam negara, khususnya Indonesia yang pertama-tama harus dibangun di era reformasi ini. Jawabannya adalah masyarakat.

Hal ini dikarenakan, bangunan masyarakat menentukan bangunan berbangsa dan bernegara. Masyarakat adalah unsur utama bernegara.

Salah satu usaha yang dilakukan berkaitan dengan cita-cita membangun masyarakat reformasi adalah dengan membangun sebuah “masyarakat multikultural Indonesia” dari puing-puing tatanan masyarakat Orde Baru yang bercorak “masyarakat majemuk (*plural society*).

Dalam proses pencarian dan pembentukan inilah keberadaan novel mengambil peranan pentingnya. Novel merupakan insititusi sosial bermediumkan bahasa. Pada ranah teoretis tertentu, sebuah novel merupakan respons dan sekaligus merepresentasikan model kehidupan yang biasa disebut sebagai *secondary modelling system* (Lotman, 1977). Berkaitan dengan ideologi multikulturalisme, novel juga berpotensi menjadi model masyarakat multikultural di Indonesia. Kenyataannya, pasca 1998 buku sastra yang terbit khususnya novel luar biasa banyak, berjumlah ratusan judul. Tidak sedikit di antaranya yang mengangkat isu-isu multikulturalisme seperti interaksi dan dialog yang terjadi antarbudaya dan agama juga konflik maupun solusi yang menyertainya.

Membaca novel-novel tersebut seperti dihadapkan pada realitas sosial yang ada di hadapan orang Indonesia. Melalui pandangan hidup pengarang yang merupakan bagian dari masyarakat, problematika multikultur diangkat dan ditanggapi. Lebih jauh lagi, saat novel-novel tersebut sampai di tangan pembaca, diharapkan dapat menjadi inspirasi dan tentu saja model masyarakat multikultural yang harmonis di Indonesia.

Lima novel yang akan dijadikan objek dan dibahas kemudian merupakan beberapa dari banyak novel yang bersinggungan dengan multikulturalisme. Alasan mengapa peneliti memilih kelima novel di bawah ini, antara lain, novel-novel tersebut merupakan novel yang berhasil menembus pasar konsumen dengan oplah yang tinggi. Artinya, novel-novel tersebut digemari oleh masyarakat dan dibaca oleh banyak orang. Berangkat dari asumsi itu, diperkirakan novel-novel tersebut akan mempengaruhi pembacanya, baik bergerak secara paralel dengan pengembangan masyarakat multikultural di Indonesia maupun berjalan ke arah sebaliknya.

Novel itu adalah, *Saman* (1998) karya Ayu Utami, *Supernova* (2001) karya Dee (Dewi Lestari), *Cha Bau Kan* (2004) karya Remy Silado, *Laskar Pelangi* (2006) karya Andrea Hirata, dan *Ayat-Ayat Cinta* (2006) karya Habiburrahman El-Shirazy. *Saman* dan *Supernova* mencoba mengangkat kehidupan orang-orang yang dekat dengan teknologi *microchip*, digital, dan dunia maya. Dunia teknologi yang demikian adalah wujud dari globalisme. Sementara itu, globalisme adalah konsep yang sejalan dan mendukung multikulturalisme. *Laskar Pelangi* mengangkat kehidupan orang Melayu, Tionghoa, dan orang-orang Sawang dengan berbagai perbedaan budaya di Pulau Belitung. Dialog antara peradaban Barat dan Timur (Islam dan Kristen) diungkap dalam *Ayat-Ayat Cinta*. Kisah romantika yang dibumbui dengan masalah-masalah etnik antar bangsa mengungkapkan konflik tersendiri terhadap masalah kedominanan suatu golongan. Yang terakhir proses perjuangan eksistensi orang-orang Tionghoa di Indonesia dipotret dalam *Cha Bau Kan*.

Masalah yang diangkat oleh novel-novel di atas mencerminkan berbagai konsep yang hendak diperjuangkan atau diselamatkan oleh multikulturalisme. Inilah alasan utama pemilihan lima novel objek di atas. Sementara itu, langkanya atau bahkan belum tersedianya rumusan yang jelas mengenai posisi novel dalam kaitannya dengan perkembangan multikulturalisme di Indonesia mendukung orisinalitas penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini hendak menguraikan satu masalah utama, yaitu mengklarifikasi politik multikulturalisme novel-novel pasca Orde Baru. Hal utama yang diperhatikan adalah bagaimana strategi dan politik multikultural novel-novel Indonesia selama ini. apakah berjalan paralel dengan cita-cita negara atau malah menghambat. Bagaimana model kehidupan multikultural tersebut dihadirkan, seberapa penting multikulturalisme dijadikan isu dan wacana sehingga novel-novel tersebut ikut mengondisikan suatu bacaan yang kondusif bagi perkembangan pemahaman multikulturalisme di Indonesia dan nantinya dalam penciptaan masyarakat multikultural Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap politik multikulturalisme dalam novel-novel Indonesia pasca Orde Baru memiliki dua tujuan, yaitu tujuan teoretis dan tujuan praktis. Tujuan teoretis penelitian ini adalah mengklarifikasi politik multikulturalisme novel-novel Indonesia pasca Orde Baru. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan piranti-piranti teori pendukung lainnya, politik multikulturalisme dalam novel, bagaimana bentuk dan strateginya, serta implikasinya terhadap masyarakat dapat diketahui.

Tujuan praktis penelitian ini adalah memberikan pengetahuan kepada pembaca bahwa terdapat beberapa novel yang dapat dijadikan alternatif model kehidupan multikultural di Indonesia. Selain itu, penelitian ini secara umum juga merupakan langkah nyata untuk menyebarluaskan konsep multikulturalisme.

1.4 Tinjauan Pustaka

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah pandangan yang mengupayakan untuk mengakui kesederajatan kelompok-kelompok yang berbeda baik secara individual maupun secara kebudayaan (Fay 1996, Jary dan Jary 1991, Watson 2000). Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat dipandang mempunyai kebudayaan yang berlaku umum dengan corak seperti mosaik yang mencakup kebudayaan-kebudayaan kecil di dalamnya. (Reed, ed. 1997). Jika di Indonesia, dalam pandangan multikulturalisme, *Bhineka Tunggal Ika* tidak diartikan sebagai keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya, tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Seperti yang sejak dahulu sudah diungkapkan dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945, “Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan daerah” (Suparlan, 2002).

Beberapa konsep yang relevan dengan multikulturalisme dan yang akan diperjuangkan kesederajatannya yaitu, politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas. Isu-isu multikulturalisme mencakup isu mayoritas-minoritas,

dominan-tidak dominan, yang terjadi dalam masyarakat yang entah berbeda agama, suku bangsa, bahasa, etnik, entah pendidikan, pandangan hidup, pekerjaan, dan bahkan status sosial.

Menurut Bikhu Parekh (2001) dalam *Rethinking Multiculturalism*, istilah multikulturalisme mengandung tiga komponen, terkait dengan kebudayaan, merujuk pada pluralitas kebudayaan, dan cara tertentu untuk merespons pluralitas itu. Akar kata multikulturalisme itu sendiri memang kebudayaan. Kebudayaan di sini dilihat dari perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia, yaitu bagaimana kebudayaan menjadi pedoman hidup bagi kehidupan manusia.

Dalam konteks keindonesiaan, multikulturalisme berfungsi sebagai perekat baru integrasi bangsa Indonesia, khususnya di era reformasi ini. Kebudayaan seragam dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi dan semangat demokrasi global yang juga meningkat sejalan dengan reformasi tersebut. Ideologi multikulturalisme diharapkan terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam setiap struktur kegiatan kehidupan manusia (sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya) yang merupakan wujud dari suatu kebudayaan.

Multikulturalisme menjadi urgen bagi seluruh masyarakat Indonesia karena realitas kebhinekaan dari mulai suku bangsa, bahasa, agama, ras, golongan, pendidikan, dan lain-lain yang dihadapinya. Selain itu, kenyataan bahwa dalam beberapa dasawarsa terakhir konflik (vertikal dan horizontal) dan tindak diskriminasi begitu mewarnai kehidupan Indonesia juga merupakan alasan kuat mengapa multikulturalisme dapat dijadikan alternatif penyelamatan.

Menurut Suparlan (2002), upaya membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin terwujud bila, (1) konsep multikulturalisme menyebar luas dan dipahami bangsa Indonesia, (2) terdapat kesamaan pemahaman diantara para ahli mengenai makna multikulturalisme dan konsep-konsep yang mendukungnya, dan (3) ada upaya nyata untuk mewujudkan cita-cita itu.

Sejauh ini, untuk buku-buku berbahasa Indonesia, belum ditemukan kajian yang secara eksplisit dan fokus membicarakan atau mengkaji tentang multikulturalisme terhadap novel-novel Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa perspektif politik multikulturalisme masih belum sepenuhnya mendapat tanggapan

memadai dalam mengkaji persoalan-persoalan karya sastra khususnya dalam peran politik kewacanaan yang dapat dimainkan oleh karya sastra.

Kajian yang cukup dekat dengan persoalan politik multikulturalisme adalah kajian Salam (2008). Dalam kajian itu Salam menyebutkan bahwa tidak semua novel dapat dijadikan “model” dalam mengembangkan satu desain dalam kerangka strategi kebudayaan. Salah satu novel yang dapat diklarifikasi sebagai salah satu model antara lain novel *Mantra Pejina Ular* karya Kuntowijoyo (2000). Di dalam novel itu diceritakan tokoh yang bernama Abu Kasan Sapari. Sapari diceritakan dalam satu karakter yang layak diteladani atau dijadikan model dalam pembentukan kebudayaan Indonesia. Dalam persoalan tersebut, bagaimana menempatkan strategi kebudayaan dalam kerangka politik kebudayaan belum mendapat perhatian yang memadai.

1.5 Landasan Teori

Multikulturalisme ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya pengakuan penghargaan, dan sikap saling dukung antaretnis, agama, golongan, dan budaya tertentu dalam suatu masyarakat modern. Multikulturalisme berlawanan dengan monokulturalisme dan asimilasi yang menjadi paradigma negara-bangsa (nation state) sejak abad ke 19. Monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara homogen, sedangkan asimilasi merupakan penyatuan dua kebudayaan atau lebih, dengan mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada sehingga tercipta kebudayaan baru. Multikulturalisme tidak menghendaki homogenitas atau mereduksi perbedaan yang merupakan kekayaan budaya, tetapi menekankan keanekaragaman kebudayaan yang sederajat.

Multikulturalisme itu sejalan dengan beberapa paham lain seperti pluralisme, masyarakat terbuka (*open society*), dan globalisme. Pluralisme adalah suatu paham yang bertolak dari kenyataan pluralitas masyarakat. Ia tidak bertolak dari asumsi bahwa setiap kultur itu sama, justru yang disadari adalah adanya perbedaan. Pluralisme identik dengan paham masyarakat terbuka (*open society*) yang memungkinkan tegaknya demokrasi dan mencegah bentuk-bentuk otoritarianisme. Dalam masyarakat terbuka, seseorang bisa belajar dari orang lain, suatu kelompok

bisa belajar dari kelompok lain. Masyarakat terbuka mengandung potensi inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang selanjutnya mendorong perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik dan menungkingkan dikembangkannya perdamaian dunia serta globalisasi.

Namun, multikulturalisme selangkah lebih maju dari pluralisme. Kontak kultural dalam multikulturalisme tidak hanya membuahkan toleransi, melainkan membuahkan saling pengaruh dan memperkaya masing-masing budaya. Asumsi dari konsep multikulturalisme adalah bahwa sebenarnya diri seseorang, diri suatu komunitas kebudayaan antaragama terbangun dari aneka budaya, bahwa di dalam diri seseorang ada orang lain, di dalam orang lain ada seseorang yang lain, bahwa satu orang dengan orang lain tidak pernah terpisahkan, telah menjadi satu kesatuan.

Seperti sudah diungkapkan dalam latar belakang di atas, terdapat beberapa konsep yang relevan dengan multikulturalisme, Konsep-konsep yang diperjuangkan kesedarajatanya oleh multikulturalisme. Konsep-konsep tersebut antara lain, demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa, agama, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komunitas, dan lain-lain.

Untuk menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam novel dan kemudian menemukan konsep-konsep multikulturalisme di dalamnya diperlukan pemahaman dan kerja semiotik. Semiotik merupakan ilmu yang mempelajari tentang sistem tanda (Barthes, 1980; Saussure 1988; Luxemburg, 1989). Tanda sendiri dapat diartikan sebagai 'sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain'. Sesuatu yang mewakili itu disebut sebagai penanda (tanda), sedangkan yang diwakili adalah petanda (makna). Benda-benda dan berbagai keadaan yang ada di sekitar dan bahkan di dalam kehidupan manusia hampir tidak pernah tampil untuk dirinya sendiri, melainkan mewakili sesuatu yang lain, pengertian-pengertian manusiawi mengenainya mempunyai makna tertentu.

Teks dan unsur-unsur teks dalam novel merupakan tanda. Namun, tanda-tanda tersebut tidak terbatas pada teks yang tertulis. Hubungan antara penulis, novel, dan pembaca juga menyediakan pemahaman mengenai tanda (Ratna, 2004:1). Jadi,

untuk memahami konsep multikulturalisme dalam novel perlu adanya penelusuran terhadap tanda-tanda yang ada di sekitarnya.

Beberapa gagasan yang dikembangkan oleh Jurij Lotman dalam bukunya yang berjudul *The Structures of the Artistic Text* (1977, University of Michigan) memberikan sumbangan yang komprehensif dalam penelitian ini terutama untuk menjelaskan kedudukan karya sastra sebagai sistem model kedua (*secondary modelling system*) kehidupan. Konsep ini digunakan untuk menemukan unsur-unsur multikulturalisme dalam novel yang dimungkinkan dapat menjadi model kehidupan masyarakat Indonesia.

Selain itu, untuk merumuskan strategi dan politik kebudayaan (salah satu konsep atau bahkan akar konsep multikulturalisme) novel-novel Indonesia, penelitian ini menggunakan buku *Strategi Kebudayaan* (1985) karya CA. Van Peursen sebagai acuan utama yang relevan, dan beberapa gagasan yang dikembangkan oleh Ignas Kleden dalam bukunya *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan* (1988).

Beberapa buku tentang multikulturalisme secara umum menjadi acuan teoretik penelitian ini adalah *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach* (1996, Blackwell) karangan Brian Fay; *We Are All Multiculturalist Now* (1997, Harvard University Press) karangan Nathan Glazer; *Multi America: Essays on Culture Wars and Peace* (Penguin) yang dieditori oleh Ishmed Red; dan *Multiculturalism* (2000, Open University Press).

1.6 Metode Penelitian

Secara umum, penelitian ini menggunakan metode analisis kusastraan dan kewacanaan. Interpretasi terhadap karya sastra adalah suatu cara atau prosedur untuk mengetahui atau mendapatkan hal-hal yang tidak tampak, tidak terkatakan, atau tidak terceritakan dalam suatu karya sastra (novel). Untuk mendapatkan hal tersebut dibutuhkan suatu prosedur atau metode yang sesuai dengan fakta atau data yang sedang dikaji dengan mengetahui dan mengidentifikasi masalah, pemanfaatan teori yang relevan, inventarisasi dan pengelolaan data sebagai bukti, dan penyimpulan (Chamamah Soeratno, 2001: 18-19).

Sesuai dengan kajian ini, langkah pertama untuk menerapkan metode adalah dengan mengetahui apa saja hal-hal yang ingin diketahui dalam interpretasi tersebut. Langkah kedua adalah mengetahui bagaimana data dipilih atau diseleksi. Data dipilih berdasarkan pembacaan awal terhadap populasi dan beberapa di antaranya dijadikan sampel kajian. Langkah ketiga adalah mengetahui varian atau indikator multikulturalisme dalam novel-novel. Langkah keempat adalah menentukan unit analisis untuk dapat menjawab berbagai pertanyaan di atas.

Sementara itu, metoda kewacanaan terbagi dalam empat metode, yakni metode distribusional, metode pragmatig, metode deskriptif, dan metode analisis konten. Sesuai dengan masalah yang akan dikaji, maka metode kewacanaan yang relevan adalah metode analisis konten (Mulyana, 2005: 74-78).

Terdapat tiga karakter penting dalam analisis wacana. Pertama, mempelajari wacana berarti suatu kerja yang mencoba menganalisis ekspresi yang terjadi secara aktual, seperti terdapat dalam komunikasi tulis ataupun percakapan sehari-hari, atau bahkan tulisan di media. Kedua, analisis yang difokuskan pada unit-unit bahasa yang melampaui batas-batas sebuah kalimat tunggal. Oleh karena itu, fokus analisis diarahkan pada urutan ekspresi yang diperluas yang terdapat dalam sebuah percakapan ataupun teks. Ketiga, analisis yang memberi perhatian pada hubungan bahasa dan aktivitas nonbahasa. Dalam hal tertentu, kecenderungan ini menjadikan analisis wacana menjadi sangat relevan pada upaya mengeksplorasi hubungan antara bahasa dan ideologi (Thompson (1985: 6-12).

Berdasarkan pemetaan itu, data-data yang diperoleh terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer berupa konsep-konsep multikulturalisme yang implisit dalam unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam novel-novel pasca Orde Baru yang telah dipilih sebagai objek material penelitian.

Sementara itu, data-data sekunder diperoleh melalui buku-buku, ulasan-ulasan, atau kertas kerja yang memuat tentang konsep multikulturalisme di Indonesia, teori sosiologi sastra (karya sastra sebagai sistem model kedua), dan konsep strategi serta politik kebudayaan Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

Kajian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut. Bab I, pendahuluan. Bab II berisi survai umum tentang politik kebudayaan dan aspek-aspek multikulturalisme novel-novel Indonesia. Bab III, merupakan uraian tentang politik kebudayaan dalam novel-novel sejak zaman kolonial hingga Orde Baru. Bab IV berjudul “Politik Multikulturalisme dalam Novel-Novel Pasca Orde Baru”. Bab V, penutup yang berisi kesimpulan. * * *

BAB II

POLITIK KEBUDAYAAN DI INDONESIA

Indonesia menghadapi realitas keberagaman semenjak kelahirannya. Kondisi keberagaman itu terwujud melalui berbagai suku bangsa, agama, ras, etnik, gender, golongan sosial ekonomi, adat istiadat, tradisi sosial, dan lain-lain. Keragaman ini dikukuhkan oleh faktor geografi Indonesia yang berbentuk kepulauan dan penduduk yang terpisah-pisah satu sama lain. Bahkan, Azra (2007) menyebut Indonesia mengandung masyarakat-masyarakat yang berada dan hidup pada tingkat kebudayaan atau peradaban yang berbeda-beda, yang mengandung disparitas dan *gap* budaya yang besar. Dalam perspektif lain, sebagian besar bangsa Indonesia hidup dalam budaya pra-agraris, lalu sebagian besar dalam budaya agraris, sebagian lagi dalam budaya industri, dan sebagian kecil sudah memasuki budaya *IT*.

Negara, sebagai pihak yang berkewajiban untuk memelihara bangsa dan warganya merasa perlu untuk mengatur keragaman yang ada di Indonesia. Kebudayaan menjadi penting dan akhirnya dianggap kunci untuk mengatur keragaman tersebut. Hal ini disebabkan kebudayaan yang meliputi cara hidup (*way of life*), gambaran dunia (*weltanschauung*) serta sistem nilai tertentu sebagai pegangan pokok merupakan representasi perbedaan antara suku, agama, ras, dan tingkat sosial ekonomi setiap orang. Kebudayaan merupakan indikator perbedaan atau keragaman tersebut. Membicarakan perbedaan antar suku, berarti membicarakan perbedaan kebudayaan mereka. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, salah satu hal terpenting bagi Negara yang harus dikendalikan adalah kebudayaan.

Di bawah ini akan diuraikan bagaimana pemerintahan di Indonesia berusaha mengakomodasikan berbagai macam kebudayaan yang ada sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan kepentingan masing-masing. Pembicaraan ini dibatasi hanya sejak masa kolonial hingga pasca Orde Baru. Hal ini disebabkan pengertian Indonesia dan kesadaran tentang identitas Indonesia secara menyeluruh baru dirumuskan dan diakui sejak munculnya pergerakan nasional pada awal abad 20 yang juga berarti pada masa akhir kekuasaan kolonial Belanda.

2.1 Politik Kebudayaan pada Masa Kolonial dan Pendudukan Jepang

Kebudayaan merupakan faktor penting yang harus dikendalikan dan ‘dilestarikan’ oleh pemerintahan kolonial Belanda demi kepentingan kolonialisasinya. Kebudayaan yang dilestarikan tentu saja kebudayaan yang mendukung posisi mereka. Kebudayaan ini diwujudkan setidaknya dalam sistem pendidikan, strata sosial, agama, dan kesenian.

Pada sekitar tahun 1901, Belanda memberlakukan politik etis (*Ethical Policy*, *Ethische Politiek*), atau juga dikenal sebagai politik balas budi. Tiga hal utama dalam politik etis Belanda pada masa itu adalah irigasi, migrasi, dan edukasi. Dalam hal edukasi, pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah gaya Barat untuk kalangan pribumi. Sekolah-sekolah ini didirikan untuk menghasilkan pribumi-pribumi yang bisa dipekerjakan oleh Belanda. Sasaran *out put*-nya hanya agar pribumi bisa berhitung, membaca, dan menulis. Setelah lulus dari sekolah, mereka dipekerjakan sebagai pegawai kelas rendah untuk kantor-kantor Belanda di Indonesia. Sekolah-sekolah tinggi seperti STOVIA dan OSVIA hanya diperuntukan bagi kaum bangsawan saja. Melalui sekolah-sekolah ini muncul kelompok nasionalis yang memelopori pergerakan nasional. Walaupun demikian, akulturasi dan masuknya nilai-nilai budaya Barat (Belanda) tidak terelakan.

Belanda menjaga agar perbedaan tetap ada bahkan menciptakannya. Hal ini sesuai dengan politik *divide et impera* dan penting untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah kolonial. Dalam hal kelas sosial, Belanda membagi penduduk Indonesia ke dalam tiga kelas¹, golongan kulit putih (Eropa, Amerika, Jepang, dan campuran atau indo), golongan Timur Asing (Tionghoa, Arab, dan India), dan golongan Bumiputera. Perbedaan ini bersifat hierarkis atau vertikal terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai penduduk. Secara hukum, tiga golongan ini memiliki peraturan yang berbeda. Untuk golongan pertama dan kedua di atas berlaku hukum Barat (Belanda) dan untuk golongan pribumi berlaku hukum adat. Perbedaan ini berimplikasi pada perbedaan yang lain seperti perbedaan hak memperoleh pendidikan (sekolah) bahkan hak menggunakan alat transportasi.

¹Pada masa penjajahan Belanda pembagian kelas penduduk diatur secara hukum oleh Pasal 162 juncto Pasal 131 Indische Strategeling (IS).

Jauh hari sebelumnya, Tirto Adi Suryo telah mencoba melawan politik Belanda ini melalui wacana wacana tandingan yang disebarakan dalam kerja jurnalistiknya di *Medan Prijaji*. Ia menawarkan rumusan baru yang berporos pada penyusunan kategori berdasarkan kriteria *bangsa yang memerintah* dan *anak negeri yang terprentah*. Inilah rumusan paling dini dari bangsa Indonesia yang melampaui kriteria rasialis, etnisitas, bahasa, agama dan peradatan; sebuah rumusan yang sepenuhnya ditegakkan di atas kriteria sosial-ekonomi-politik. Jadi, Tirto merumuskan sesuatu yang dapat menyatukan bangsa Indonesia atau paling tidak rumusan yang lebih tidak mengundang perpecahan seperti yang diinginkan Belanda. Tirto ingin bangsa Indonesia menyadari kebutuhan yang mendesak kala itu adalah kemerdekaan. Dan ternyata terbukti, kebutuhan akan merdeka akhirnya mengalahkan segala macam perbedaan. Ada semacam “proyek bersama” yang harus dihadapi yang mengatasi perbedaan.

Kembali kepada permasalahan hukum dan pembagian status sosial, ternyata hal ini berdampak kepada unsur perbedaan yang lain yaitu agama. Belanda menyadari bahwa jika Indonesia bersatu mereka akan terkalahkan. Maka sebisa mungkin Belanda menghindari persatuan itu dengan menegaskan perbedaan-perbedaan yang ada tanpa toleransi. Artinya, Belanda selalu membuka kesempatan lebar terhadap perpecahan karena inilah yang mereka inginkan. Untuk golongan bumiputera diberlakukan hukum adat sehingga di setiap tempat dengan adat berbeda hukum yang diberlakukan juga berbeda. Sementara itu di sisi lain, hukum adat kadang dipertentangkan dengan hukum agama, misalnya hukum agama Islam. Dan jika pemerintah kolonial merasa ada yang mulai tidak terkendalikan maka hukum Eropa dapat berlaku lintas golongan, mengatasi segala jenis hukum di atas.

Bahkan, untuk agama Islam, kolonial Belanda memiliki cara dan politik tersendiri untuk mengendalikannya. Belanda menganggap Islam secara politik sangat berbahaya bagi kekuasaannya. Seorang ilmuwan Belanda, Snouck Hurgronje, mempunyai ide besar untuk memindahkan ‘umat’ dari ranah politik dengan memecah-mecah atau membagi. Islam yang berpolitik sangat berbahaya bagi kolonial untuk itu dicari-cari musuh untuk mereka. Jadi, Belanda dengan berbagai

cara memecah Islam menjadi ada dua kubu, Islam politik dan Islam non-politik. Perbedaan antara dua kubu ini adalah sebagai berikut.

No	Kategori	Islam Politik	Islam non-Politik
1.	Pendidikan	Pesantren	Sekolah-sekolah sekuler
2.	Ekonomi	Pedagang (punya kontak jaringan dengan ulama)	Buruh dan tani (jauh dari agama)
3.	Migrasi	-	Orang-orang dipindahkan agar jauh dari guru agama/ulamanya.

Jadi, perbedaan bukan dipelihara dengan baik dengan pengakuan dan kesedarajatan seperti kehendak multikulturalisme sekarang akan tetapi diciptakan, difrontalkan, dan diharapkan mampu memecah belah Indonesia.

Sementara itu, di dalam bidang kesenian terutama kesusastraan Belanda melakukan kontrol dengan menciptakan berbagai peraturan atau undang-undang. Salah satunya adalah *persbreidelordonnantie 1930* (JKB, 1999:16). Berdasarkan peraturan dan undang-undang ini pemerintah kolonial bebas melakukan tindakan represif berupa pelarangan ataupun pembredelan terhadap novel-novel yang dianggap membahayakan². Kontrol ini dipakai untuk melindungi kepentingan kolonial Belanda yang tidak menginginkan perubahan yang dapat mengancam kedudukan dan dominasi politiknya. Balai Pustaka didirikan untuk mendukung kontrol ini dengan memonopoli penerbitan bahan bacaan bagi anak-anak sekolah zaman penjajahan. Kriteria bacaan yang baik ditentukan oleh badan ini

²Novel yang isinya bermuatan idealisme politis (golongan sosialis-marxis seperti novel *Student Hidjo* karya Marco Kartodikromo dan *Hikayat Kadiroen* karya Semaun). Novel yang murni komersial seperti roman bulanan Cina-peranakan; roman bulanan terbitan Medan seperti *Dunia Pengalaman* oleh A. Damhuri, Joesoef Sou'yb, dan Matu Mona; *Roman Pergaulan* pimpinan Tamar Djaja dan *Perjuangan Hidup* di Bukittinggi, juga merupakan karya sastra yang dilarang kolonial. Mereka menilai bacaan demikian dapat "menyesatkan golongan muda" karena isinya hanya cerita detektif, cerita kejahatan, pencurian dan pembunuhan, serta yang "semuanya menyedihkan saja". Kedua jenis karya sastra ini berada di luar Balai Pustaka dan disebut "Bacaan Liar". Lihat, Jakob Sumardjo, 1999, *Konteks Sosial Novel Indonesia 1920-1977*. Bandung: penerbit Alumni, 112-116.

(Sumardjo,1999:110). Karena itu, karya-karya Marco Kartodikromo, Semaoen, Kwee Tek Hoay, Tan Boen Kim, dan Liem Wie Leng yang mengangkat tema-tema antiimperialisme dan menggunakan bahasa Melayu Rendah tidak diterbitkan Balai Pustaka.

Sastrawan Indonesia yang menerbitkan karyanya di Balai Pustaka, penerbit milik pemerintah kolonial Belanda, mengalami nasib penyensoran, karena naskah yang diterbitkan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah Belanda. Akibatnya, isi novel *Salah Asuhan* karya Abdul Muis, misalnya, berbeda jauh dengan isi naskah aslinya. Begitu juga nasib novel *Belenggu* karya Armin Pane yang ditolak oleh penerbit Balai Pustaka. Sementara novel-novel yang terbit di luar Balai Pustaka dilecehkan dengan dicap sebagai bacaan liar, novel picisan, dan dianggap bisa meracuni masyarakat.

Jadi, pada masa kolonial Belanda perbedaan (kebudayaan) dalam masyarakat Indonesia begitu dipertajam. Akan tetapi, dendam penderitaan rakyat akibat penjajahan yang berkepanjangan menenggelamkan perbedaan-perbedaan tersebut. Pada masa itu kebutuhan untuk merdeka lebih penting dari apapun. Kesadaran atas perbedaan kebudayaan itu dan konsep-konsep yang menyertainya seperti pluralisme atau bahkan multikulturalisme tidak menjadi urgen ketika berhadapan dengan keinginan merdeka. Sementara itu, perlawanan yang dilakukan Indonesia kepada Belanda lebih merupakan perlawanan fisik dan diplomasi politik. Perlawanan secara kultural belum ada atau sangatlah terbatas. Hal ini mengindikasikan konsep kultur Indonesia pada masa itu belum dirumuskan dengan baik.

Dalam diskursus budaya dan kesusastraan memang ada semacam ‘perlawanan’ terhadap hegemoni nilai-nilai Barat. Perlu diketahui, pada sekitar tahun 1935 Sutan Takdir Alisjahbana membawa pembaharuan dalam dunia intelektual Indonesia melalui pemikirannya tentang kebudayaan Indonesia. Ada ajakan oleh sastrawan seperti misalnya Sanusi Pane untuk kembali kepada nilai-nilai ketimuran. Kebudayaan Indonesia, menurut Sutan Takdir Alisjahbana, bukanlah sambungan kerajaan Mataram, Sriwijaya, atau Majapahit. Kebudayaan Indonesia yang dimaksud Sutan Takdir Alisjahbana adalah kebudayaan yang terlepas dari kebudayaan praIndonesia dan harus berorientasi ke Barat. Karena, masyarakat

Indonesia yang statis harus diubah menjadi dinamis. Untuk itu, kita harus mencontoh negara-negara yang dinamis, yakni negara-negara Barat.

Pemikiran ini mendapatkan perlawanan dari tokoh-tokoh seperti Sanusi Pane dan Poerbatjaraka. Menurut mereka, untuk membangun kebudayaan Indonesia, kita harus mengetahui jalan sejarah dari dulu sampai sekarang. Kita justru membangun masa depan. dengan bertitik tolak dari masa lalu. Poerbatjaraka mengingatkan, kita jangan mabuk kebudayaan kuno, tapi jangan juga mabuk kebudayaan Barat. Yang ideal adalah kita mengetahui kedua kebudayaan itu, Barat dan Timur, dan memilih yang baik dari keduanya untuk membangun kebudayaan Indonesia (Kartamihardja, 1998). Akan tetapi perdebatan ini hanya sebatas wacana di kalangan tertentu dan terbatas. Dibandingkan dengan siasat Belanda dalam mengendalikan kebudayaan Indonesia yang luas, berakar, dan menyentuh hampir segala lini kehidupan, perlawanan mereka terasa sangat lemah.

Kekalahan Sekutu oleh Jepang, krisis ekonomi dunia tahun 1939 dan perlawanan rakyat Indonesia membuat kekuasaan Belanda runtuh dan berakhir. Akan tetapi, perluasan wilayah kekuasaan guna memasok kebutuhan pasukan dan pangkalan perang melawan Sekutu membuat Jepang akhirnya menguasai Indonesia. Jepang mengendalikan Indonesia dengan cara militeristik, otoriter dan penuh kekejaman. Mereka menghendaki satu kebudayaan dan spirit bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu spirit dan kebudayaan Jepang. Berkebalikan dengan Belanda yang mempertegas perbedaan demi mengadu domba, Jepang sama sekali tidak mentolerir perbedaan.

Ideologi, norma-norma, peraturan ala Jepang diterapkan di setiap lini kehidupan. Jepang bergerak murni secara dominatif. Sama sekali tidak ada proses hegemonik seperti halnya yang dilakukan oleh Belanda. Oleh karena hanya secara dominatif dan waktu pendudukan yang sangat singkat, selama 3,5 tahun, Jepang tidak membawa perubahan yang berarti dalam ranah kebudayaan Indonesia. Hanya kehancuran fisiklah yang teramat berat dirasakan rakyat Indonesia (terutama dari praktik *romusha*). Penderitaan fisik ini tidak memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk merumuskan satu arah kebijakan kultural tertentu pada masa itu.

2.2 Politik Kebudayaan Orde Lama

Presiden Soekarno dan pemerintahannya telah berhasil merumuskan satu identitas nasional bagi bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Soekarno mulai melihat adanya realitas keragaman di dalam Indonesia dan berusaha mengakomodasi seluruh perbedaan itu. Seperti telah diketahui pemerintahan Soekarno memiliki kedekatan yang intensif dengan sosialisme. Akan tetapi, Soekarno berusaha untuk merangkul segala golongan dalam menjalankan kehidupan bernegara yang kemudian terwujud dalam Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme).

Nasakom di satu sisi merupakan cara untuk menguasai dan melanggengkan kekuasaan terhadap rakyat yang sangat beragam. Di sisi lain, kelahiran Nasakom merupakan wujud pengakuan dan penghormatan Soekarno terhadap perbedaan. Nasakom meliputi berbagai macam organisasi sosial politik yang terdiri atas banyak partai penganut ragam macam aliran, kepercayaan dan agama yang ada secara obyektif di Indonesia. Partai-partai seperti PNI (Partai Nasional Indonesia), PARTINDO (Partai Indonesia), Partai NU (Nahdatul Ulama), PSII (Partai Sarikat Islam Indonesia), Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Partai Murba, PKI (Partai Komunis Indonesia) adalah merupakan salah satu bentuk poros kekuatan politik Orde Lama yang terhimpun dalam Nasakom. Jadi, perbedaan ideologi atau agama yang berujung pada perbedaan kultur pada masa itu tidak menjadi masalah, selama akomodatif terhadap Negara. Hal ini menjadi dipermasalahkan ketika Negara tampak memberi perhatian yang lebih besar terhadap satu sisi tertentu, yang dalam hal ini adalah komunisme (PKI).

Kedekatan Soekarno dengan PKI tidak hanya dipandang dari sudut politik tetapi juga kebudayaan. Demokrasi Terpimpin yang diumumkannya melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberikan wewenang yang sangat besar pada Lekra, *underbouw* PKI, yang merupakan partai pendukung kebijakan-kebijakan Soekarno dalam mengembangkan kebudayaan. Keputusan dan kenyataan inilah yang akhirnya mengawali sebuah polemik besar tentang kebudayaan yang digawangi Lekra di satu sisi dan para budayawan yang tergabung dalam Manikebu di sisi lain.

Polemik kebudayaan yang terjadi antara Lekra dengan penandatanganan Manifest Kebudayaan paling banyak terlihat dalam perjalanan sastra Indonesia. Polemik Kebudayaan melahirkan generasi Surat Kepercayaan Gelanggang dan kelompok Manifest Kebudayaan. Sebelum terjadi polemik ini, pada tahun 1950, tepatnya 18 Februari 1950, seniman-seniman muda yang terdiri dari Chairil Anwar (28 tahun), Asrul Sani (24 tahun), Rivai Apin (23 tahun), M. Balfas (24 tahun), M. Akbar Djuhana (26 tahun), Mochtar Apin (25 tahun), Henk Ngantung (23 tahun), dan Baharudin (39 tahun) mengeluarkan pernyataan Surat Kepercayaan Gelanggang untuk menyikapi persoalan kebudayaan sekaligus memperlihatkan orientasi kebudayaan mereka, yang memperkuat bahkan mengembangkan pendapat Sutan Takdir Alisjahbana sebelumnya, bahwa orientasinya bukan ke Barat saja, tetapi mendunia (Ismail, 1995).

Enam bulan setelah lahirnya Surat Kepercayaan Gelanggang, tepatnya 17 Agustus 1950, lahir sebuah organisasi yang *concern* terhadap bidang budaya. Organisasi itu bernama Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Pengagasnya adalah D.N. Aidit, Njoto (Iramani), M.S. Ashar, dan A.S. Dharta yang saat itu berusia 27 tahun. Lekra adalah gerakan kebudayaan yang bersifat nasional dan kerakyatan, yang didalamnya memang ada orang-orang yang menjadi anggota PKI, tetapi sebagian besarnya bukan (Ajoeb, 2004:7).

Setelah terbit Dekrit Presiden tahun 1959, Lekra banyak mewarnai kehidupan kebudayaan di Indonesia, termasuk sastra Indonesia (Eneste, 1988: 90). Dalam sidang pleno Pimpinan Pusat Lekra pada Juli 196, semboyan politik adalah panglima diterima sebagai asas kerja kreatif (Ajoeb, 2004: 14). Joebaar Ajoeb menjelaskan, Indonesia sebagai bekas daerah jajahan memerlukan semboyan politik adalah panglima, karena pada 1950-an ada semacam propaganda yang hendak mengusir atau menjauhkan seniman dan sastrawan keluar dari gelanggang politik. Propaganda itu, misalnya, menyebut politik hanya menjadi urusan orang politik, politik itu kotor, seniman dan sastrawan itu suci, tidak perlu ikut-ikutan berpolitik, termasuk dalam berkarya. Lekra menentang propaganda yang bertentangan dengan semangat Kebangkitan Nasional (Ajoeb, 2004: 16-17).

Semangat Lekra ini mendapat perlawanan antara lain dari intelektual-intelektual muda seperti Goenawan Mohamad (22 tahun), Arief Budiman (23 tahun), Boen S. Oemarjati (23 tahun), dan Taufiq Ismail (26 tahun). Bersama H.B. Jassin, Wiratmo Soekito, dan Trisno Sumardjo, mereka mengeluarkan pernyataan berupa Manifes Kebudayaan yang tidak bisa menerima konsep politik adalah panglima dan realisme sosialis. Dalam penjelasannya, selain menyinggung dua hal itu, mereka juga menjelaskan konsep kesenian mereka, humanisme universal, dan pandangan mereka mengenai kebudayaan nasional.

Polemik ini cukup berpengaruh dalam hal menyikapi arah kebijakan kebudayaan Indonesia pada masa itu. Tampak bahwa kedua kubu belum bisa menerima pandangan masing-masing. Pertentangan terjadi karena ternyata pandangan mereka berpengaruh terhadap posisi dan pemerolehan hak-hak tertentu dalam hubungannya dengan Negara. Seandainya Negara bisa berlaku lebih adil, mungkin sekali perbedaan tersebut tidak meruncing dan dapat berjalan berdampingan tanpa merugikan siapapun. Inilah satu dari beberapa kegagalan Soekarno dalam mengakomodasi perbedaan yang ada.

Selanjutnya, di dalam Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila, di satu sisi terjadi apa yang disebut *excessive democraton*, suatu keadaan di mana demokrasi berlaku berlebihan, dengan partai politik yang sangat banyak dan suara-suara yang tidak terkendali. Sementara di sisi lain, untuk menghadapi keberlebihan itu, Soekarno menjalankan kediktatoran terselubung (*verkapte diktatuur*). Sistem multipartai dan multi ideologi yang lahir dari sistem demokrasi yang berlebihan akhirnya berujung pada munculnya pemberontakan dari gerakan-gerakan separatis, misalnya pemberontakan DI/TII yang berhaluan theokratisme Islam fundamental. Lebih jauh lagi, kebebasan yang berlebihan memunculkan konflik ideologi misalnya antara Pancasila dengan Islam, komunis dengan Islam, dan sebagainya.

Hal ini menunjukkan bahwa pada masa Orde Lama, kesadaran akan perbedaan sudah muncul dan usaha penghormatan atasnya sudah dilakukan oleh Soekarno. Hanya saja, umur Indonesia yang masih muda dan kegagalan sistem pemerintahan membuat perbedaan tersebut tidak terkelola dengan baik sehingga memunculkan konflik. Kesadaran akan perbedaan tersebut ternyata juga masih

dimiliki oleh kalangan tertentu saja. Rakyat secara keseluruhan belum diarahkan menuju pemahaman itu.

2.3 Politik Kebudayaan Orde Baru

Dalam Negara Orde Baru, keberadaan Pancasila semakin dipersucikan. Ia merupakan landasan ideologi yang harus diresapi oleh setiap individu dalam kehidupannya masing-masing. Kesadaran akan perbedaan juga semakin sering digaungkan melalui semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ada semacam kepentingan kekuasaan ketika membicarakan semboyan Bhineka Tunggal Ika ini. Tentu saja Negara menyadari perbedaan di Indonesia untuk kemudian membuat mereka tetap bersatu agar mudah diakomodasikan demi kepentingan kekuasaannya. Walau demikian, sebagian elemen Negara dan rakyat juga terus berusaha menemukan ideologi yang cocok dalam menyikapi keragaman Indonesia ini. Pada waktu itu jawabannya adalah pluralisme.

Pluralisme secara sederhana diartikan sebagai kemajemukan. Van den Berghe (1970) mensyaratkan beberapa ciri masyarakat plural, yakni adanya kelompok-kelompok sosial atau kelompok budaya dengan budaya yang berbeda-beda. Kelompok-kelompok ini hidup berdampingan (*coexist*) dalam batas-batas dari sebuah kesatuan politik dan memiliki sistem ekonomi bersama, yang membuat kelompok-kelompok ini tergantung satu sama lain. Meskipun demikian, kelompok-kelompok ini sedikit banyak bersifat otonom dan memiliki struktur kepranataan yang berbeda dalam bidang-bidang kehidupan yang lain, seperti kekerabatan, keagamaan, dan sebagainya.

Indonesia adalah negeri yang plural karena terdiri dari berbagai suku bangsa yang hidup di bawah satu sistem politik yang sama. Mereka hidup berdampingan walau tidak selalu saling mengenal dan memahami. Kemajemukan di Indonesia ini merujuk kepada dua jenis, yaitu kemajemukan sosial dan kemajemukan budaya. Kemajemukan sosial meliputi berbagai macam kategori, kelompok, golongan, lapisan, status sosial, relasi sosial, dan jaringan sosial yang ada dalam suatu masyarakat atau komunitas, sedang kemajemukan budaya merupakan berbagai macam perangkat nilai, kepercayaan, pandangan hidup, norma, aturan-aturan dalam

sebuah masyarakat atau komunitas, yang dianut oleh kelompok, lapisan, atau golongan sosial yang berbeda-beda.

Kemajemukan Indonesia ini dirasakan menjadi masalah dalam dekade terakhir ini ketika konflik antarkelompok, antarsuku, antar pemeluk agama terjadi di berbagai tempat. Hal ini disebabkan, beberapa orang di sekitar kita tidak siap menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada manakala perbedaan tersebut membawa akibat yang kurang menguntungkan terhadap penguasaan sumber-sumber daya tertentu. Artinya, pluralisme sepenuhnya belum berhasil mengatasi kondisi keragaman dan efek-efek yang ditimbulkannya di Indonesia.

Faktor lain penyebabnya adalah kenyataan bahwa Pancasila, *Bhineka Tunggal Ika*, dan pluralisme hanya berhenti sebagai jargon. Kesatuan politik tidak mampu menghilangkan realitas pluralitas sosial-budaya yang sangat divisif, khususnya ketika Indonesia gagal menemukan “*common platform*” yang dapat mengintegrasikan berbagai keragaman itu (seperti pada kasus Orde Lama). Akhirnya, Negara memiliki kecenderungan kuat untuk kembali melaksanakan politik “keseragaman budaya” (monokulturalisme). Apalagi hal ini penting dan menjadi urgen ketika Orde Baru ingin mempertahankan kekuasaannya. Jadilah Orde Baru pemerintahan yang secara jargon plural tetapi realitasnya sangat monokultur, diktator, dan otoriter. Jika ada suatu hal yang dianggap ‘membahayakan’, Negara langsung membereskannya. Dalam proses pemberesan ini seringkali tindak diskriminatif, tindak kekerasan, dan lain-lain dilakukan oleh Negara. Selama Orde Baru berkuasa, tindak diskriminatif paling kentara diperlakukan terhadap seluruh warga etnis Tionghoa yang dianggap menyokong kegiatan G30SPKI. Dugaan ini terus digunakan untuk menandai keberadaan dan identitas Tionghoa di Indonesia. Kejahatan Orde Baru menjadi memori pahit tersendiri bagi mereka.

Dipandang dari sudut kebudayaan, politik mono-kulturalisme Orde Baru yang mengatasnamakan stabilitas untuk *developmentalism* telah menghancurkan *local cultural geniuses*. Padahal, sistem atau tradisi sosiokultural lokal seperti ini merupakan kekayaan kultural yang ternilai bukan hanya bagi masyarakatnya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat-masyarakat lain. Lebih jauh lagi, *local geniuses* juga berfungsi sebagai *defense mechanism* dan sekaligus *early warning system* yang

dapat memelihara integrasi dan keutuhan sosiokultural masyarakat bersangkutan. Politik mono-kulturalisme yang telah menghancurkan *local genius* ini, yang pada gilirannya mengakibatkan kerentanan dan disintegrasi sosial-budaya lokal. Konflik dan kekerasan yang bernuansa etnis dan agama yang khususnya marak di beberapa daerah sejak 1996 tidak terlepas dari hancurnya *local geniuses* tersebut. Jadi, apa yang terjadi menjadi semacam lingkaran setan bagi Indonesia. Monokulturalisme yang diharapkan mampu mengendalikan perbedaan dan konflik yang disebabkan justru malah semakin memicu konflik.

Kegagalan pluralisme dalam menggantikan monokulturalisme mendesak adanya suatu pemikiran baru untuk mengatasi permasalahan keragaman dan perbedaan yang ada di Indonesia. Kalangan intelektual kemudian mulai mengenalkan konsep multikulturalisme, yang lebih dulu populer dan bahkan di beberapa Negara Barat (Perancis dan Amerika) telah dijadikan semacam kebijakan yang diimplementasikan dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan hak warga Negara dan kebudayaan.

Lawrence A. Blum mendefinisikan multikulturalisme sebagai sebuah pemahaman, penghormatan, dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri (2001: 16). Selanjutnya, menurut Blum, multikulturalisme mengandung tiga sub nilai lagi. *Pertama*, menegaskan identitas kultural, mempelajari, dan menilai kebudayaan seseorang.

Kedua, menghormati dan berkeinginan untuk memahami dan belajar tentang kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaannya. *Ketiga*, menilai dan merasa senang dengan perbedaan itu sendiri, yaitu memandang keberadaan dari kelompok-kelompok budaya yang berbeda dari masyarakat sebagai kebaikan positif yang patut dihargai dan dipelihara (2001: 19). Lebih jauh lagi, wawasan multikultural menghendaki sikap “peduli” dan mau mengerti (*difference*), atau merupakan

“*politics of recognition*”, politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas (Cf Taylor et al 1994).

Cita-cita multikulturalisme lebih jauh lagi adalah mampu menjadi landasan budaya terkait erat dengan pencapaian *civility* (keadaban) yang sangat esensial bagi demokrasi yang berkeadaban dan keadaban yang demokratis (*democratic civility*). Dalam upaya penumbuhan dan pengembangan *democratic civility* melalui multikulturalisme, maka *civil society* (CS) dan pendidikan menduduki peran sangat instrumental. dalam hal CS seperti ini, perlu pengembangan sikap inklusif, toleran, dan respek terhadap pluralitas. Pada saat yang sama, juga harus dikembangkan CS yang mengatasi berbagai garis demarkasi tersebut, menjadi organisasi yang melintasi batas-batas etnis, agama dan sosial, sehingga pada gilirannya dapat menjadi “*social and cultural capital*” yang esensial bagi pengembangan dan pemberdayaan civilitas dan demokrasi yang berkeadaban (cf. Hefner 2001:9-10).

Berdasarkan cita-cita di atas, kenyataannya, kesadaran multikultural di Indonesia masih sangat rendah. Masyarakat Indonesia masih kurang bisa atau enggan untuk memahami kebudayaan lain bahkan kebudayaan mereka sendiri. Sementara itu, multikultural merupakan nilai atau pemahaman baru yang lebih dikenal dalam dunia pendidikan formal sehingga kelompok yang tidak tersentuh pendidikan formallah yang paling berpotensi berkonflik karena kesadaran multikulturalnya yang masih rendah. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka peluang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan meresapi multukilturalisme dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di sinilah peran Negara, institusi social, lembaga pendidikan, budaya, dan kesenian diperlukan sebagai tempat berkembangnya multikulturalisme.

2.4 Politik Multikulturalisme Pasca Orde Baru

Setelah Orde Baru runtuh, posisi Pancasila sebagai pedoman identitas nasional Indonesia semakin melemah. Terdapat setidaknya tiga faktor yang membuat Pancasila semakin sulit dan marjinal. *Pertama*, Pancasila terlanjur tercemar karena kebijakan rejim Soeharto yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan status-quo kekuasaannya. Rejim Soeharto juga

mendominasi pemaknaan Pancasila yang selanjutnya diindoktrinasikan secara paksa melalui Penataran P4.

Kedua, liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan oleh Presiden BJ Habibie tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi. Penghapusan ini memberikan peluang bagi adopsi asas-asas ideologi lain, khususnya yang berbasiskan agama (*religious-based ideology*). Pancasila jadinya cenderung tidak lagi menjadi *common platform* dalam kehidupan politik. *Ketiga*, desentralisasi dan otonomisasi daerah yang sedikit banyak mendorong penguatan sentimen kedaerahan, yang jika tidak diantisipasi bukan tidak bisa menimbulkan sentimen *local-nationalism* yang dapat tumpang tindih dengan *ethno-nationalism*. Dalam proses ini, Pancasila baik sengaja maupun *by-implication* kian kehilangan posisi sentralnya.

Oleh karena itu, mengikuti istilah Azra (2007) perlu dilakukan proses *rehabilitasi dan rejuvenasi Pancasila*, melalui apa yang dinamakan multikulturalisme. Perlu dipahami bahwa multikulturalisme dan Pancasila secara esensial memiliki tujuan dan pandangan-pandangan yang sama. Ketika multikulturalisme dapat dipahami dan terimplementasi dengan baik dalam kehidupan masyarakat Indonesia maka otomatis Pancasila juga akan terpelihara dan terwujudkan.

Pada bab-bab selanjutnya akan diuraikan bagaimana kebudayaan yang dimiliki oleh berbagai masyarakat yang beragam direpresentasikan dalam karya sastra. Pemahaman tentang apa yang dilukiskan dalam karya sastra akan selalu berada pada paradigma multikulturalisme. Jadi, pertanyaan sederhana yang hendak dijawab adalah apakah karya sastra dan kehidupan yang digambarkannya mendukung multikulturalisme atau tidak. Lalu mengapa ada karya sastra yang mendukung dan ada yang tidak. Beberapa karya sastra yang ditulis sejak masa colonial hingga pasca Orde Baru akan dijadikan sampel. Perbedaan secara politik dan tentu saja kebudayaan antara beberapa masa di atas berpengaruh terhadap karya sastra yang dihasilkannya dan kemudian juga representasi kebudayaan di dalamnya. Penelusuran terhadap perkembangan ini penting untuk mengetahui seberapa jauh potensi pandangan multikulturalisme di dalam karya-karya tersebut. * * *

BAB III

MULTIKULTURALISME NOVEL-NOVEL SEBELUM REFORMASI

3.1 Politik Kebudayaan Kolonial dan Jepang dalam Novel Indonesia

Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, Pemerintah kolonial membentuk Balai Pustaka dan kemudian juga Pujangga Baru sebagai alat pengendali kesusastraan baik secara represif maupun hegemonik. Tindak represif terutama dilakukan oleh Balai Pustaka karena mereka berhak menentukan mana karya sastra yang bisa terbit dan mana yang tidak bisa terbit. Sementara itu, ideologi kolonial lebih bekerja secara hegemonik terhadap kelompok yang tergabung dalam redaksi majalah Pujangga Baru.

Balai Pustaka mengembangkan kritik untuk mengenyahkan ‘bacaan tidak bermutu’ alias bermuatan politik dan mengembangkan sastra Balai Pustaka yang bermutu tinggi. Pemisahan sastra bermutu dan tidak bermutu lahir dari percampuran kepentingan penguasa politik untuk menekan ekspresi yang mengancam dan pemikiran ‘penguasa sastra’ yang bekerja dalam kerangka kekuasaan pihak yang pertama. Ukuran ‘mengancam’ juga tidak semata-mata politik, tapi juga moral, budaya, dan ekonomi (JKB, 1999: 108). Beberapa dekade setelah Balai Pustaka lahir, majalah Pujangga Baru pun terbit dan melahirkan generasi-generasi sastrawan yang lebih muda. Tujuan didirikannya majalah ini adalah untuk mengembangkan sastra Indonesia modern yang bergaya Barat.³

Dalam kondisi yang serba terkendali dan dikontrol seperti di atas bagaimanakah novel pada masa itu merepresentasikan kebudayaan Indonesia dan sikap-sikap yang bersumber padanya? Wacana besar yang muncul dalam novel-novel pada masa itu adalah perbenturan budaya antara Barat dan Timur, serta masalah-masalah

³Pujangga baru adalah nama majalah kebudayaan dan kesusastraan yang terbit antara tahun 1933 sampai 1942 di Jakarta, dan kini digunakan untuk menggambarkan gaya khas sastra yang merupakan ciri majalah ini. Foulcher, Keith. 1991. *Pujangga Baru Kesusastraan dan Nasionalisme di Indonesia 1933-1942*. Jakarta: Girmukti Pasaka. Hlm. 5

sampingan yang muncul karenanya seperti pertentangan kalangan tua-muda, masalah moral individu dan sosial, serta tentang hubungan antara penjajah dan yang terjajah. Hanya saja, pemahaman Barat, moral dan kedudukan kolonial (sebagai penjajah) tampak mendominasi dan digambarkan jauh lebih ‘baik’ dibandingkan nilai Timur yang diidentikan dengan pribumi (yang terjajah).

Dalam *Sitti Nurbaya*, tokoh utamanya yang bernama Syamsul Bahri, hidup dan berkebiasaan seperti halnya orang Belanda. Samsulbahri dikenal baik budinya; peramah, pengasih, dan penyayang; penolong tanpa melihat rupa dan bangsa. Dalam ketentaraan ia adalah Letnan Mas yang gagah berani dan telah menolong pemerintahan (Belanda) dalam beberapa kesulitan peperangan (Rusli, 1990: 331). Samsul Bahri merupakan anak seorang saudagar yang sejak kecil menerima pendidikan Belanda. Segala pakaian (Rusli, 1990:1) dan atribut hingga kebiasaan dan tempat tinggalnya menyerupai Belanda (Rusli, 1990: 7). Samsul Bahri adalah tokoh pribumi yang membela Belanda. Sementara tokoh pribumi yang tidak berada di pihak Belanda digambarkan dalam diri Datuk Maringgih, seorang yang jahat, licik, tidak berperikemanusiaan.

Masyarakat di sekitar Samsul Bahri, terutama para bangsawan begitu menjunjung tinggi Belanda. Bekerja kepada Belanda adalah kebanggaan, sehingga jangan sampai mengecewakan. Terutama sekali jika bisa bekerja menjadi polisi Belanda. Ini sangat menggiurkan banyak orang. Mereka rela tidak dibayar asal bisa menjadi polisi. Hal ini tampak pada kutipan berikut.

“...Tuan Kemendur ini baru, perintahnya keras; jadi harus berhati-hati memegang pekerjaan, supaya jangan mendapat nama yang kurang baik. Kakanda tahu sendiri, sejak dari nenek moyang kita, yang semuanya bekerja pada Kumpeni, belum ada yang dapat nama jahat, melainkan pujianlah yang diperoleh selama-lamanya. Alangkah sayangnya dan malunya hamba, bila nama yang baik itu, pada hamba menjadi kurang baik!” (Rusli, 1990: 15-16).
 “...apa sebabnya maka masih banyak saja orang yang mau bekerja di kantor polisi? Adapula yang tidak dapat gaji, walaupun ia harus berpakaian yang patut datang ke tempat pekerjaannya. Sesudah beberapa tahun barulah dapat uang bantuan 5/10 rupiah dan beberapa tahun kemudian, barulah diangkat

jadi juru tulis. Akhirnya, apabila telah tua, barulah dapat jadi menteri polisi/ajang jaksa” (Rusli, 1990: 40).

“Sebabnya ada bermacam-macam. Ada yang bekerja sesungguhnya karena hendak mencari kehidupan dengan tiada maksud lain. Itulah yang baik. Tetapi ada pula yang memandang pangkat saja, sebab pada sangkanya, apabila ia telah menjadi pegawai, telah tinggillah pangkatnya dengan dihormati dan ditakuti orang....” (Rusli, 1990:40).

Masyarakat mengagumi Belanda karena ketika menjadi Belanda kehidupan secara ekonomi menjadi lebih baik. Bahkan, menjadi dekat dengan Belanda, menjadi ke-belanda-belandaan merupakan *prestise* tersendiri. Belanda adalah orang-orang yang secara ekonomi terjamin dan dipandang terhormat oleh kelompok lain. Secara pendidikan, kelas sosial, tingkat ekonomi, tingkat peradaban, sikap, Belanda lebih unggul dari pribumi. Beberapa pribumi menjadi tercerahkan ketika mereka mengabdikan kepada Belanda.

Tokoh Hanafi dalam *Salah Asuhan* adalah tokoh pribumi yang sangat kebarat-baratan. Ia menyesali kenapa terlahir sebagai pribumi. Ia mempertanyakan banyak hal terutama berkaitan dengan adat istiadat orang pribumi yang menurutnya sangat kolot. Ia juga membenci adanya perbedaan budaya yang tercipta di setiap daerah. Sementara itu, tokoh Corrie yang adalah keturunan Prancis, lebih bisa menyikapi dan menerima perbedaan. Perhatikan kutipan berikut.

“Ah, undang-undang itu, dimanakah batasnya? Bangsaamu, bangsa Eropa, amat melonggarkan pergaulan laki-laki dengan perempuan. Nyonya yang bersuami sudah galib dibawa-bawa dan dikepit oleh tuan lain, dengan tidak ada undang-undang tersurat atau tidak tersurat yang melarangnya. Itu tentang pergaulan. Ambillah pula contoh yang lain. Di tanah Arab perempuan menutup badan sampai ke muka-muka, tapi di tanah Amerika banyak benarkota-kota ramai di pantai laut, tempat nyonya dan tuan-tuan berkeliaran saja memakai baju renang, sampai ke rumah-rumah minum. Tetapi lihatlah pula setengah bangsa Barat—jika nyonya rumah berani turun tanah memakai baju piyama, yang nyata lebih menutup kulit dari pakaian dansa, maka nyonya

yang berpakaian piyama turun ke tanah itu akan disebutkan ‘melanggar adat sopan santun’. Jadi bagiku sungguhlah gelap batas undang-undang kesopanan itu—sebab ia tidak tersurat.”

Hanafi! Engkau juga yang mulai memperbincangkan tentang adat lembaga serta tertib kesopanan masing-masing bangsa; engkaupun juga yang tak suka mengindahkan atau mengakui atas adanya perbedaan adat lembaga antara bangsa dengan bangsa. Setiap kita bertukar pikiran tentang hal itu, pada akhirnya engkau senantiasa berkecil hati seolah-olah malulah engkau, bahwa engkau masuk golongan Bumiputera, yang kau sangka bahwa aku menghinakannya. Bahwa sesungguhnya kulitku berwarna pula, ibuku perempuan Bumiputera sejati, meskipun diriku masuk dalam golongan bangsa Eropa. Dan sementara...fasal hina menghina Bumiputera lebih banyak terdengar dari mulutmu sendiri daripada dari mulutku. Kita akan memperkatakan...”

“Aku tahu betul, bahwa aku hanyalah Bumiputera saja, Corrie! Janganlah kau ulang-ulang juga.” (Muis, 1999: 2-3)

Dari penggalan di atas tampak bahwa Hanafi sama sekali tidak mampu mengakomodasi perbedaan kebudayaan yang ada di dalam kehidupan. Tokoh Corrie jauh lebih bijaksana dan ‘beradab’ dibandingkan Hanafi. Selanjutnya diketahui, Hanafi juga merasakan adanya perubahan status sosial ketika berada di lingkungan Belanda dan kemudian benar-benar menjadi orang Belanda. Ia mengubah nama menjadi ‘Christian Han’ dan memiliki hak yang sama seperti orang Eropa (Muis, 1999: 135). Dia bahkan rela berpisah dari ibunya untuk memperoleh semua itu. Sementara tokoh Corrie begitu gusar dan sedih melihat perangai Hanafi yang demikian.

Berdasarkan dua novel di atas terlihat bahwa patron-patron kebudayaan pada masa itu adalah Eropa atau Barat. Banyak orang—terutama pribumi—yang ingin mengikutinya. Barat dirasakan lebih dan sempurna dalam segala hal. Motif seperti ini hampir muncul dalam semua karya sastra yang bisa terbit kala itu. Hal ini dapat dipahami karena kontrol dan sensor kolonial saat itu begitu kuat. Yang perlu

dicermati lagi adalah adanya hierarki yang sangat jauh antara satu kelompok social dengan kelompok social yang lain, misalnya antara Eropa dan pribumi di Indonesia. Hierarki itu selalu muncul dan dipertegas. Inilah yang diharapkan oleh Belanda. Dalam segala hal mereka ingin selalu mempertajam dan menjaga perbedaan (kebudayaan) dalam masyarakat Indonesia dan mereka akan menjadi yang paling unggul serta benar.

Akan tetapi, pada tingkat kenyataannya dendam penderitaan rakyat akibat penjajahan yang berkepanjangan menenggelamkan perbedaan-perbedaan tersebut. Pada masa itu kebutuhan untuk merdeka lebih penting dari apapun. Kesadaran atas perbedaan kebudayaan itu dan konsep-konsep yang menyertainya seperti pluralisme atau bahkan multikulturalisme tidak menjadi urgen ketika berhadapan dengan keinginan merdeka. Sementara itu, perlawanan yang dilakukan Indonesia kepada Belanda lebih merupakan perlawanan fisik dan diplomasi politik. Perlawanan secara kultural belum ada atau sangatlah terbatas. Hal ini mengindikasikan konsep kultur Indonesia pada masa itu belum dirumuskan dengan baik dan keberadaannya belum merupakan sebuah kekuatan tersendiri—untuk tidak menyebutkan sebagai penyebab perpecahan⁴.

Kekalahan Sekutu oleh Jepang, krisis ekonomi dunia tahun 1939 dan perlawanan rakyat Indonesia membuat kekuasaan Belanda runtuh dan berakhir. Akan tetapi, perluasan wilayah kekuasaan guna memasok kebutuhan pasukan dan pangkalan perang melawan Sekutu membuat Jepang akhirnya menguasai Indonesia. Jepang mengendalikan Indonesia dengan cara militeristik, otoriter dan penuh kekejaman. Mereka menghendaki satu kebudayaan dan spirit bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu spirit dan kebudayaan Jepang. Berkebalikan dengan Belanda yang mempertegas perbedaan demi mengadu domba, Jepang sama sekali tidak mentolerir perbedaan. Ideologi, norma-norma, peraturan ala Jepang diterapkan di setiap lini kehidupan. Jepang bergerak murni secara dominatif. Sama sekali tidak ada proses

⁴Kondisi perlawanan sebelum ada semangat dan perumusan persatuan Indonesia masih terpecah belah. Hal ini disebabkan perlawanan tersebut masih bersifat kedaerahan. Jadi, pada model perlawanan yang demikian, kultur yang berbeda menyebabkan perlawanan gagal. Sesama pejuang tidak memiliki kesepakatan untuk menghormati apalagi memahami perbedaan masing-masing.

hegemonik seperti halnya yang dilakukan oleh Belanda. Oleh karena hanya secara dominatif dan waktu pendudukan yang sangat singkat, selama 3,5 tahun, Jepang tidak membawa perubahan yang berarti dalam ranah kebudayaan Indonesia. Hanya kehancuran fisiklah yang teramat berat dirasakan rakyat Indonesia (terutama dari praktik *romusha*). Penderitaan fisik ini tidak memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk merumuskan satu arah kebijakan kultural tertentu pada masa itu.

Jadi, tindak represif Jepang tidak membiarkan satupun wacana di luar “Jepang” hadir dalam kehidupan Indonesia, begitu pula dalam karya sastranya. Tercatat ada dua novel yang berhasil terbit pada masa Jepang, *Hulubalang Raja* karya Nur St Iskandar dan *Palawija* karya Karim Halim. Kedua-duanya adalah novel propaganda. Novel ini murni menjadi alat Jepang untuk menyebarkan ajaran dan ideologinya. Pasti, kebudayaan yang digambarkan di dalam novel itu sepenuhnya kebudayaan Jepang. Sebagai contoh, ditelusuri novel *Hulubalang Raja* karya Nur St Iskandar seperti di bawah ini.

Oleh karena Jepang datang sebagai penolong Indonesia dari jajahan Belanda, maka segala hal tentang Barat dan Belanda menjadi musuh utama. Jepang akan berada di posisi yang kontra dengan Belanda. Di dalam *Hulubalang Raja*, Jepang meyakini bahwa kemenangannya terhadap Rusia, adalah awal kebangkitan dunia Timur (Iskandar, 1963: 65). Jepang datang sebagai saudara tua Indonesia. Menurut mereka, Indonesia dan Jepang sama-sama kulit berwarna—yang berarti oposisi dari kulit putih (Iskandar, 1963: 77). Mereka sangat membenci Belanda. Belanda hanya mementingkan kepentingan sendiri, tidak peduli kepada rakyat Indonesia. Belanda jahat dan sangat kejam kepada rakyat Indonesia.

Yang diutamakan dahulu hanyalah mempertunjukkan kejayaan Barat, ketinggian derajat ekonomi dan industri Barat belaka. Kebalikannya diusahakan oleh Belanda mempertontonkan kelemahan, keburukan, dan kehinaan Timur....dalam pada itu dinyatakan pula tinggi rendah kebudayaan dan peradaban pelbagai golongan bangsa di Indonesia. yang tinggi sangat ditinggikan, yang rendah sangat direndahkan. Perbedaan golongan sangat dibesar-besarkan. Dengan cara demikian timbulah perpecahan diantara

segala golongan itu. [sifat *devide et impera* Belanda] (Iskandar, 1963:12-13)

.....

“... Politik Imperialis loba tamak...” (Iskandar, 1963:33)

Belanda memakai masjid, rumah Allah, sebagai tangsi serdadu. Belanda merusakbinasakan dan memperkosa adat tertib sopan anak negeri (Iskandar, 1963:75).

Sementara itu, Jepang menawarkan kesamarataan dan keadilan. Tidak ada pembedaan kelas asing atau ‘inlander’ (Iskandar, 1963:28). Pemerintah bala tentara Nippon juga membuka banyak lapangan pekerjaan. *Pemerintah bala tentara segera mengatur penghidupan rakyat dengan sebaik-baiknya. Bermacam-macam kerja dan usaha diadakan. Mana yang mau bertani diberi tanah...* (Iskandar, 1963: 64). Dalam novel ini Jepang memperoleh simpati orang Indonesia karena pendekatannya yang sangat persuasif. Kebencian Jepang kepada Belanda (dan permusuhannya secara umum kepada dunia Barat) sangat menguntungkan posisinya di Indonesia, selain keberhasilannya mengusir Belanda dari Indonesia tentunya.

Tidak seperti kehidupan Belanda yang berkelas-kelas, Jepang menawarkan egalitarian. Selain itu, Jepang juga mengambil alih segala urusan penghidupan rakyat. Jepang tidak hanya mempedulikan kehidupan militernya saja. Akan tetapi memperhatikan penghidupan rakyat umum secara keseluruhan. Militer, selain memikirkan aspek ketahanan, juga mengurus masalah ekonomi. Jepang juga berjanji memperbaiki dan mengembalikan kebudayaan Indonesia—kebudayaan Timur—yang telah dirusak Belanda. Militer Jepang dikatakan sebagai penyelamat kehidupan rakyat Indonesia dalam segala aspeknya.

Sebuah kalimat yang menunjukkan betapa hebat dan agungnya Jepang adalah sebagai berikut. “Jepang dikirimkan oleh Allah untuk membantu Indonesia merdeka” (Iskandar, 1963:122). Mereka memiliki semboyan; Amerika kita setrika, Inggris kita linggis, Sekutu kita sapu (Iskandar, 1963: 165). Jepang dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia, wakil Tuhan yang menyelamatkan Indonesia. Wacana ini

menunjukkan bahwa Jepang juga menggunakan legitimasi agama dan spiritualitas untuk meraup simpati rakyat Indonesia.

Jadi, dari novel ini tampak bahwa yang dinamakan kebudayaan berarti kebudayaan Jepang. Tidak ada kebudayaan Indonesia atau bahkan sekedar pemikiran tentang suatu kebudayaan dari masyarakat pribumi.

3.2 Politik Kebudayaan Orde Lama dalam Novel Indonesia

Menurut Aprinus Salam (2008), memasuki fase setelah merdeka, novel Indonesia sebagian besar secara tematik justru banyak bernostalgia tentang masa-masa merebut kemerdekaan (perang terhadap kompeni), tentang arti kepahlawanan, dan dalam beberapa hal bagaimana mengisi kemerdekaan. Hampir tidak ditemukan novel yang bercerita tentang kondisi pascakemerdekaan. Kehidupan yang dihadirkan adalah kehidupan masa lalu. Hal itu, terutama tampak pada karya-karya Mohtar Lubis; *Djalan Tak Ada Ujung*, *Sendja di Djakarta*, hingga *Maut dan Cinta*, karya-karya Trisno Juwono, karya-karya Pramoedya Ananta Toer dan sebagainya. Novel-novel bertema revolusi ini sangat dianjurkan oleh pemerintah untuk memupuk rasa nasionalisme rakyat—yang berarti langgengnya kekuasaan mereka.

Selain itu, seperti telah dikemukakan di atas, pemerintahan Soekarno mendapat dukungan dan memiliki haluan yang mengekor pada negara-negara sosialis di Eropa dan Asia Timur. Segala hal yang berbau imperialisme dan Barat dalam kehidupan masyarakat Indonesia ditentang tegas. Begitu pula di dalam karya sastra. Segala hal yang berbau Barat dan penjajah harus dienyahkan. Segala perbedaan melebur dalam satu kepentingan yaitu kemerdekaan dan revolusi. Konflik yang diangkat dalam karya sastra bukan konflik internal antara orang-orang Indonesia (seperti pada kenyataannya yang terjadi kala itu) tetapi konflik eksternal antara rakyat Indonesia dengan penjajah (Belanda atau Jepang). Jarang sekali ada pembicaraan mengenai status ataupun kelas sosial.

Misalnya saja dalam novel *Perburuan* karya Pramoedya Ananta Toer. Tokoh Hardo dalam novel *Perburuan* adalah seorang shodanco PETA. Namun ia tidak bisa mengendalikan diri melihat kekejaman Jepang kepada bangsanya, sehingga ia bersama tiga orang *shodanco* lain yang membawa shodan-nya masing-masing

memutuskan untuk memberontak (Toer, 1955: 59). Oleh karena pengkhianatan yang dilakukan Karmin, salah satu temannya, pemberontakan Hardo gagal. Ia pun diburu-buru Jepang dan bersembunyi. Dalam persembunyiannya itu, ia menemukan kenyataan orang-orang yang berkhianat padanya, orang-orang yang tunduk pada Jepang, yang pengecut dan pecundang. Namun, ia tetap mempertahankan prinsipnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan memaafkan orang-orang yang telah berkhianat.

Atas perjuangannya menentang Jepang itu, Hardo menjadi dihormati oleh rakyat kecil (Toer, 1955: 20). Bahkan kelihaiannya berkelit dari buruan Jepang membuat orang-orang yakin dia memiliki ilmu gaib (Toer, 1955: 20). Rakyat yang menderita oleh siksaan Jepang memandang pemberontakan Hardo sebagai perwakilan perasaan mereka (Toer, 1955: 23). Perbuatan Hardo adalah perbuatan sejati (Toer, 1955: 26).

Jadi, budaya egaliter (Hardo adalah anak bangsawan, tapi ia tidak mempedulikannya), patriotisme, paham persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh manusia mengalahkan budaya kolonialitas ataupun Jepang. Egaliter dan patriotisme juga mengalahkan budaya hierarkis masyarakat bangsawan tradisional di Indonesia. Identitas Indonesia sudah digunakan. Tokoh-tokoh tidak lagi menyebut dirinya orang Jawa atau pribumi, tetapi Indonesia. Pembicaraan mengenai masalah perbedaan agama, etnis, ras, dan lain-lain juga tidak dibicarakan.

Contoh lain adalah novel *Jalan Tak Ada Ujung* karya Mochtar Lubis. Tokoh yang bernama Hazil dalam novel ini merupakan pejuang sejati. Sementara orang-orang yang tidak mendukung revolusi seperti halnya tokoh Guru Isa dan Mr. Kamaruddin harus 'tersiksa' batin ataupun lahir. Akan tetapi pada akhirnya Guru Isa pun sadar. Tepatnya ketika ia ditangkap oleh Belanda karena kedudukannya sebagai bagian dari BKR. Justru ketika ditangkap itu keberaniannya muncul. Jiwa pejuangnya hadir dan membuat dia mengerti bahwa revolusi memang penting, bahwa pengorbanan Hazil dan teman-temannya itu begitu berarti. Saat kesadaran itu muncul, beban yang ia rasakan pun hilang. Impotensi yang selama ini ia derita sembuh. Artinya, ketika ketakutan Guru Isa hilang, ketika keberanian dan kesadarannya menjadi bagian dari laskar rakyat muncul, segala masalah yang

dihadapi seperti mendapatkan penyelesaiannya sendiri-sendiri. Ia bahkan berjiwa besar memaafkan Hazil yang telah berselingkuh dengan istrinya, Fatimah. Guru Isa pun merasa lebih mantap dan bahagia menjalani hidup ke depannya.

Selain Guru Isa, orang yang tidak sepeham dengan arus revolusi lainnya adalah Mr. Kamaruddin, ayah Hazil. Bahkan ia masih mengharapkan kehadiran Belanda. Ia adalah orang yang mengidam-idamkan Indonesia kembali diduduki Belanda, karena menurutnya kala itu suasana lebih aman dan rakyat lebih makmur.

Dia telah mencoba diam-diam berhubungan kembali dengan Belanda dan merab-raba apakah mereka hendak menerima dia bekerja kembali. Belanda telah memberikan janji-janji padanya, tetapi membayangkan juga, bahwa untuk orang tua seperti dia yang telah berumur 60 tahun tidak ada tempat yang pantas (Lubis, 1952: 43-44).

Hal lain yang membuat ia benci revolusi adalah karena membuatnya berselisih paham dengan sang anak, Hazil. Selain itu, menurut Mr. Kamaruddin, revolusi telah menjadikan anaknya liar. Pada zaman Belanda dan Jepang dahulu Hazil adalah seorang anak yang baik kelakuannya, selalu menurut kata ayahnya, tetapi sekarang jauh berbeda. Mr. Kamaruddin merasa, Hazil telah menjadi kasar dan liar selama revolusi ini (Lubis, 1952: 43).

Namun, di akhir cerita Mr. Kamaruddin mengakui bahwa sekarang giliran kaum muda yang memimpin negara, yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia berpesan pada anaknya, Hazil, bahwa sudah saatnya kaum tua dengan berbagai pandangan menyingkir dan menyerahkan kepercayaan pada yang muda (Lubis, 1952: 90).

Jadi, Belanda, Jepang, kaum tua, hierarkis, tradisionalitas, pribumi, adalah hal atau konsep sejajar yang hendak dibongkar dan dihancurkan oleh patriotisme, egalitarian, kaum muda, dan identitas Indonesia di dalam novel-novel Orde Lama tersebut.

3.3 Politik Kebudayaan Orde Baru dalam Novel-Novel Indonesia

G30S/PKI pada 1965 menjadi awal perubahan politik di Indonesia. Dua tahun sesudahnya, Soekarno resmi mundur dari jabatan presiden dan digantikan oleh

Soeharto. Mulailah suatu masa yang disebut Orde Baru. Tindakan awal pemerintahan Orba adalah ‘membersihkan’ segala macam unsur dari PKI. Hal ini juga berlaku di ranah kesusastraan. Tidak hanya secara fisik, namun juga pikiran bahwa tekanan pemerintah telah membuat perubahan besar terhadap identitas dan ideologi kesusastraan Indonesia.

Orde Baru secara terang-terangan memberikan cap “bau komunis” pada hampir setiap kesenian, terutama kesenian rakyat yang sebagian besar sebelum tahun 1966 pernah dikembangkan Lekra. Kampanye politis “bau komunis” itu mengimplikasikan merosotnya apresiasi seni secara drastis di hampir semua komunitas seni di Indonesia. Dalam ranah kesusastraan, sebagian besar sastrawan dan penulis kreatif yang dituduh ‘terlibat G30SPKI’ lenyap dari dunia sastra, umumnya karena dipenjara. Sebagian lain menyingkir dari arena karena ‘tidak bersih diri’, seperti pernah menjadi anggota LEKRA yang telah dilarang. Perubahan ini lebih dari sekedar pergantian tokoh kesusastraan tapi jauh masuk ke dalam pemikiran sastra itu sendiri. Para sastrawan yang bertahan di awal Orde Baru kemudian mengembangkan konsep karya sastra yang bertolak belakang dengan pemikir LEKRA.

Konsep ‘politik adalah panglima’ termasuk yang paling dimusuhi, begitu pula dengan karya-karya yang mengangkap persoalan sosial dalam masyarakat, khususnya perlawanan rakyat miskin atau pertentangan di dalam masyarakat. Sastra sebisa mungkin dipisahkan dari politik.

Salah satu cara untuk menjauhkan kehidupan sastra dari politik adalah dengan membangun pusat-pusat baru dimana birokrasi secara leluasa mengarahkan dan menentukan apa pun yang didiskusikan dan dipentaskan sesuai dengan kehendak olitiknya. Pusat-pusat ini antara lain Taman Ismai Marzuki di Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Pusat Kesenian Jakarta (PKJ), atau dewan kesenian di tiap daerah yang dijaga oleh sejumlah penerbitan sastra resmi seperti *Horison* dan *Basis*.

Lembaga-lembaga ini kemudian melalui berbagai festival, penghargaan, penerbitan resmi mulai mengembangkan ‘sastra yang diresmikan atau diabsahkan’. Konsep ‘politik adalah panglima’ diganti dengan ‘estetika adalah panglima’.

Penguasa sastra berkepentingan menjaga sastra dari kontaminasi politik, sementara penguasa politik berkepentingan menjaga stabilitas dengan mencegah unsur subversi masuk melalui bidang sastra (JKB, 1999: 108-109).

Selain itu, pada masa Orde Baru digalakkan apa yang dinamakan *sastra universal* (sastra yang berpedoman pada nilai-nilai atau kriteria kesusastraan), yang sebelumnya diperjuangkan dalam surat Kepercayaan Gelanggang (18 Februari 1950) dan Manifes Kebudayaan (17 Agustus 1963) (Heryanto, 1985: 5). Penggalakkan ini dimaksudkan untuk menjauhkan sastra dari dunia politik⁵.

Orde Baru adalah rezim yang otoriter. Meskipun semboyan yang diagungkan adalah Bhineka Tunggal Ika dan pluralisme, akan tetapi di tingkat kenyataannya, Orde Baru sangat monokultural. Orde Baru mengendalikan seluruh lini kehidupan rakyatnya, termasuk kebudayaan. Segala sesuatu yang ekstrem baik ekstrim kiri (komunis) maupun ekstrem kanan (agamis) begitu dibatasi pergerakannya. Tidak ada keragaman dan kebebasan berekspresi. Segalanya begitu terkendalikan. Tidak terkecuali dalam karya sastra. Dua buah novel akan dijadikan sampel dalam rangka membuktikan tesis di atas, yaitu *Pergolakan* karya Wildan Yatim dan *Ronggeng Dukuh Paruk* karya Ahmad Tohari.

Novel PG bersetting di sebuah desa pedalaman Sumatera pada tahun 1960-an. Cerita berkisah tentang penumpasan terhadap pemberontakan PRRI dan PKI. Tokoh utamanya bernama Guru Salam (Abdul Salam). Dia seorang sipil biasa yang harus menerima kenyataan anaknya menjadi pemberontak. Pemberontak disini, seperti PRRI dan PKI adalah sekelompok orang yang dianggap melawan dan memiliki ideologi yang bertentangan dengan pemerintah.

⁵Sastra universal ini mendapatkan tandingan yang dicetuskan pertama kali oleh Arif Budiman yang disebut sastra kontekstual. Wacana sastra kontekstual dibicarakan oleh Arif Budiman pertama kali di sarasehan Kesenian di Solo pada tahun 1984. Sarasehan ini dilaksanakan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Simposium Nasional Kesusastraan Indonesia Modern di Yogyakarta. Secara ideologis, kedua pertemuan ini mengukuhkan pandangan yang berbeda mengenai keberadaan sastra di Indonesia. Pertemuan di Yogyakarta secara tidak langsung mendukung apa yang dinamakan sastra universal, sedangkan pertemuan di Solo mencoba melahirkan wacana tandingan bernama sastra kontekstual. Lihat Heryanto, Ariel. 1985. *Perdebatan Sastra Kontekstual*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 4-5

Tentara pemerintah membakar rumah-rumah penduduk tempat pemberontak bersarang. Mereka mengungsi, dan *tentara yang mengawal menangkap dan menempelengi mereka sehingga semua orang berjalan merunduk dengan jari dan bibir gemetar pasi* (Yatim, 1974: 91-92). Namun, tindakan kekerasan tentara ini tidak dinilai sebagai suatu kekejaman. Bagi masyarakat ini adalah tindakan yang benar. Perhatikan kutipan di bawah ini.

Pasukan pusat bukanlah ingin kejam benar, lagipula setiap orang lebih mementingkan keselamatan jiwa sendiri. Asal mereka lari ke hutan, tak berani menghadang, mereka takkan diburu lagi. Mereka mengadakan pemeriksaan, menyiksa seseorang penduduk atau mengangkutnya ke Tanjung, dan buru-buru kembali sebelum hari gelap (Yatim, 1974: 86).

Jadi, pemikiran yang merupakan hasil dari “berbudaya” benar-benar dikendalikan oleh Negara. Paham yang tidak sesuai akan dihancurkan. Dalam konteks ini, seperti telah diungkapkan di atas, Orde Baru memusuhi komunis dan kaum agamis sekaligus. Jadi, PKI dan PRRI memang musuh utama mereka kala itu.

Sementara itu, novel *Ronggeng Dukuh Paruk* menceritakan sebuah kehidupan masyarakat yang tinggal di sebuah Dukuh tertinggal. Mereka miskin, tradisional, dan bahkan masih sedikit ‘bar-bar’. Dapat dikatakan mereka belum ‘beradab’. Kemudian satu peleton tentara pemerintahan datang ke Dukuh itu (Tohari, 2003: 91). Tokoh Rasmus dan anak Dukuh Paruk lainnya amat takut ketika dipanggil oleh seorang tentara bernama Sersan Slamet. Namun karena Sersan Slamet tersenyum ramah kebakakan rasa takut Rasmus pun hilang. Bahkan rasa takut itu perlahan berubah menjadi rasa bangga, bangga karena dipanggil oleh tentara, bangga karena bisa membantu tentara (Tohari, 2003: 91).

...dari rasa takut lambat laut berubah menjadi rasa bangga. Seorang Dukuh Paruk bekerja dalam kelompok tentara. Meski pakaiannya tidak seragam dengan mereka, tetapi aku berjalan beriring dengan mereka. Bahkan aku sudah berbicara dengan pemimpin mereka, Sersan Slamet. Aku telah berkenalan dengan seorang tentara.

Karena merasa bangga bekerja dengan sekelompok tentara, maka aku mampu mengeluarkan tenaga lebih dari biasanya (Tohari, 2003: 91).

Kehadiran tentara, kehadiran Rasmus di Dukuh Paruk membawa semacam semangat baru selain tentunya menciptakan keamanan. Mereka menangkap semua perampok-perampok. Jadi, selain menciptakan ketertiban umum dalam masyarakat. Tentara sebagai wakil negara juga memiliki fungsi untuk membangun masyarakat. Mereka membangun jiwa-jiwa patriotik dalam individu-individu seperti Rasmus, mereka membangun rasa percaya diri dan rasa aman, secara lebih luas lagi, mereka telah membangun peradaban bagi warga Dukuh Paruk.

Dari penelusuran terhadap novel-novel dari zaman kolonial hingga Orde Baru, ditemukan sebuah kesimpulan bahwa kultur yang ada di dalam novel adalah kultur yang dikehendaki oleh negara. Sementara kultur yang berlawanan tidak bisa diceritakan di dalamnya. Jadi, novel-novel masa kolonial sebagian besar menceritakan kebudayaan kolonial. Perepresentasian kultur di dalam novel berjalan paralel dengan misi negara untuk mengontrol rakyatnya. Novel menjadi bagian— untuk tidak menyebut alat—politik kebudayaan yang dijalankan Negara. * * *

DAFTAR PUSTAKA

- Ajoeb, Joebar. 2004. *Sebuah Mocapat Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Teplok Press.
- Azra, Azyumardi. 2007. "Keragaman Indonesia: Pancasila dan Multikulturalisme" dalam *Semiloka Nasional Keragaman Suku, Agama, Ras, Gender sebagai Modal Sosial untuk Demokrasi dan Masyarakat Madani: Tantangan dan Peluang*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Barthes, Roland. 1980. *Element of Semiology*. New York: Hill ang Wang
- Blum, L.A. 2001. "Antirasisme, multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras: Tiga Nilai yang bersifat Mendidik bagi Sebuah Masyarakat, Multikultural" dalam *Etika Terapan I: Sebuah Pendekatan Multikultural*, LMay, S. Collins Chobanian, K. Wong (eds). Yogyakarta: Tiara Wacana
- Faruk. 2005. *Hand out Semiotika I*. Yogyakarta: FIB UGM
- Fay, Brian, 1996, *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach*. Oxford: Blackwell
- Heryanto, Ariel. 1985. *Perdebatan Sastra Kontekstual*. Jakarta: Rajawali Press.
- Imran, Said. 2007. *Konfigurasi Politik pada Era Orde Lama dan Orde Baru: Suatu Telaah Partai Politik*. Tidak Diterbitkan.
- Jaringan Kerja Budaya (JKB). 1999. *Menentang Peradaban, Pelarangan Buku di Indonesia*. Jakarta: ELSAM.
- Jary, David dan Julia Jary, 1991, "Multiculturalism". Hal.319. *Dictionary of Sociology*. New York: Harper.
- Kymlicka, Will. 2003. *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: LP3ES
- Lotman, Jurij. 1077. *The Structures of the Artistic Text*. Michigan: University of Michigan.
- Luxemburg, Jan van, dkk. 1989. *Pengantar Ilmu Sastra* (Terj. Dick Hartoko). Jakarta: Gramedia.
- Peursen,CA. Van. 1985. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius
- Ratna, Nyoman Kutha. 2004. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari Strukturalisme hingga Poststrukturalisme*. yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Reed, Ishmed (ed). *Multi America: Essays on Culture Wars and Peace*. Penguin.

- Salam, Aprinus. 2008. *Wacana Tematik Prosa Indonesia*. Yogyakarta: Paper Lepas untuk Kuliah Teori Prosa Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya UGM.
- Saussure, Ferdinand de. 1988. *Course in General Linguistics (Linguistik Umum)*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
- Siregar, Ashadi. 2005. *Umar Kayam Luar Dalam*. Yogyakarta: Pinus
- Sumardjo, Jakob. 1999. *Konteks Sosial Novel Indonesia 1920-1977*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Suparlan, Parsudi. 2002. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural" dalam www.fisip.ac.id/antropolig/httpdocs/jurnal/2002/69/10brtpsi69.pdf
- Van den Berghe, P.L. 1970. "Pluralism" dalam *Handbook of Social and Cultural Anthropology*, J.J. Honigmann (ed). New York: MacMillan.
- Watson, C.W., 2000, *Multiculturalism*. Buckingham-Philadelphia: Open University Press.

NOVEL-NOVEL

- Dee. 2001. *Supernova*. Bandung: Truedee Books
- Hirata, Andrea. 2006. *Laskar Pelangi*. Yogyakarta: Bentang
- Iskandar, Nur St. 1963. *Cinta Tanah Air* (Cet. 4). Jakarta: Balai Pustaka
- Lubis, Mochtar. 1952. *Jalan Tak Ada Ujung*. Jakarta: Balai Pustaka
- Muis, Abdul.1999. *Salah Asuhan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rusli, Marah. 1990. *Sitti Nurbaya* (cet.20). Jakarta: Balai Pustaka
- Shirazy, Habbiburahman El. 2006. *Ayat-Ayat Cinta*. Jakarta: Republika
- Silado, Remy. 2004. *Cha Bau Kan*. Jakarta: KPG
- Toer, Pramudya Ananta. 1955. *Perburuan* (cet.2). Jakarta: Balai Pustaka
- Tohari, Ahmad. 2003. *Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk*. Jakarta: Gramedia.
- Utami, Ayu. 1998. *Saman*. Jakarta: Gramedia
- Utami, Ayu. 2002. *Larung*. Jakarta: Gramedia
- Yatim, Wildan. 1974. *Pergolakan*. Jakarta: Pustaka Jaya